

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report. Forum for Corporate Governance in Indonesia*- FCGI (2006) mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom dalam Soekrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:101) yang apabila diterjemahkan adalah:

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Adrian Sutedi (2012:1) definisi *corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate governance* yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (Gideon, 2005)

dalam Rahmawati (2012: 169) mendefinisikan *corporate governance*:

“*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ektern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG (Tjager dkk., 2003) dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:103). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

- a. “Kewajaran
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kemandirian”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan lima prinsip corporate governance sebagai berikut:

a. Kewajaran

Merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal ini yang memunculkan stakeholders (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan stockholders (pemegang saham saja).

b. Transparansi

Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

d. Pertanggungjawaban

Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

e. Kemandirian

Artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

2.1.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.”
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden”.

Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* IICG (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. “Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu factor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

2.1.1.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial, dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Terdapat enam tujuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yaitu:

1. “Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi”.

Jadi pada intinya, tujuan *good corporate governance* adalah penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang sebagaimana melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta manajemen dalam organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.

2.1.1.5 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Corporate Governance diukur dengan *Corporate Governance Perception Index*. Di Indonesia *Corporate Governance Perception Index* telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) adalah suatu lembaga Indonesia yang didirikan untuk menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dengan mempromosikan perilaku perusahaan yang etis dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan direksi dan dewan

komisaris perusahaan. Peran penting IICD adalah internalisasi praktek *corporate governance* yang baik dimana IICD secara konsisten telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) definisi *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah sebagai berikut :

“*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*)”.

Penelitian yang dilakukan oleh IICG untuk menilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yaitu setelah melakukan penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan skor kepada perusahaan peserta, besaran nilai skor ini dibuat berdasarkan acuan yang telah dibuat IICG. Skor ini diambil hasilnya berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang diberikan ke perusahaan peserta. Adapun bobot nilai yang digunakan untuk menilai GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Bobot Nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<i>Self Assessment</i>	15
2.	Kelengkapan dokumen	20
3.	Penyusunan makalah dan presentasi	14
4.	Observasi ke perusahaan	51

Sumber : www.iicg.org

Menurut CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) (2011) penilaian proses riset dalam penentuan nilai penerapan corporate governance dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Self Assessment*
 Pada tahap awal ini perusahaan diminta mengisi kuesioner *self assement* seputar penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik di perusahaannya.
- b. Kelengkapan dokumen
 Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan).
- c. Penyusunan makalah dan presentasi
 Pada tahap ini perusahaan diminta untuk menjelaskan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.
- d. Observasi
 Dalam tahap ini tim peneliti CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) akan berkunjung ke lokasi perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan di atas. Setelah keseluruhan tahapan penilaian CGPI selesai, hasil yang diperoleh dibahas dalam forum panel ahli untuk menentukan hasil riset dan pemeringkatan CGPI. Forum panel ahli terdiri dari tim peneliti beserta para pihak yang kompeten dan memiliki akses informasi tentang perusahaan peserta CGPI. Keputusan panel ahli akan menghasilkan penyusunan peringkat perusahaan public dan BUMN yang layak diberi penghargaan CGPI Award.

Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI adalah penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti yang disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Kategori Pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

Skor	Level Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya
70-84	Terpercaya
55-69	Cukup Terpercaya

Sumber : *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*, 2011

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Dalam upaya mencapai ketepatanwaktuan laporan keuangan tahunan salah satu hal yang mempengaruhinya adalah ukuran perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010:4) yang dialihbahasakan Ali Akbar Yulianto (2010) definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain”.

Menurut Riyanto (2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva”.

Sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No. IX.C.7 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah dan kecil, menyatakan bahwa perusahaan besar adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (*total asset*) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan bukan merupakan reksa dana. Sedangkan penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek yang ditawarkan oleh perusahaan menengah atau kecil,

di mana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan menurut keputusan ketua BAPEPAM No. IX.C.7 dapat diartikan sebagai suatu ukuran dengan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun

2008 diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Aset (Tanah&Bangunan) (dalam Rupiah)	Penjualan/Tahun (dalam Rupiah)
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta - 10 M	>2,5 - 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Selanjutnya, klasifikasi ukuran perusahaan menurut Stanley dan Morse

dalam Suryana (2006:119) adalah sebagai berikut:

”Industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang termasuk industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10-49 orang, industri sedang menyerap 50-99 orang, dan industri besar menyerap tenaga kerja 100 orang lebih”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Stanley dan Morse tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam industri tersebut.

2.1.2.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan, Jogiyanto (2007:282) mengemukakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya *asset* yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan dapat ditunjukkan oleh natural logaritma dari total aktiva”.

Pengukuran terhadap ukuran perusahaan menurut Prasetyantoko (2008:257) adalah sebagai berikut:

“Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya ukuran perusahaan tersebut semakin besar”.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunist manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, tatapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunist tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Menurut teori keagenan manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola). Hal ini terjadi karena manajer (pengelola) mempunyai informasi

mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan mempergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain antara lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh *National Association of Fraud Examiners* (1993), Fisher dan Resenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen (1999) dalam (Sri Sulistyanto, 2008).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earning management is intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya)”.

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Earning management occurs when managers uses judgement in financial reporting and structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu)”.

Menurut Lewitt (1998) dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Earnings management is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management

decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyertakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer)”).

Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is a actions of a manager serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang)”).

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparini Harapan (2010:81) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Menurut Irham Fahmi (2013:279) definisi manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.1.3.2 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Menurut Irham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgment dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan”.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008:63):

1. “*Bonus Plan Hypothesis*
2. *Debt Covenant Hypothesis*
3. *Political Cost Hypothesis*”.

Kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bonus Plan Hypotesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi dan cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang

perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Menurut John J wild dan Subramanyam yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2010:132) mencatat ada tiga alasan yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Insentif Perjanjian
2. Dampak Harga Saham
3. Insentif Lain”.

Kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer

memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan.

Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal.

3. Insentif Lain

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoly. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing.

2.1.3.4 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2000) dalam Hikmah (2013) terdapat beberapa pola dalam manajemen laba yaitu:

- a. *“Taking a Bath*
- b. *Income Minimization*
- c. *Income Maximization*
- d. *Income Smoothing”*.

Kutipan diatas dapat dijelaskan beberapa pola dalam manajemen laba sebagai berikut:

a. Taking a Bath.

Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

b. Income Minimization.

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastic dapat diatasi dengan mengambil laba periode berikutnya.

c. Income Maximization.

Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. Income Smoothing.

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

- “Penaikan laba (*income increasing*)
- Penurunan laba (*income descreasing*)
- Perataan laba (*income smoothing*)”.

Kutipan diatas dapat dijelaskan pola manajemen laba sebagai berikut:

- **Penaikkan laba (*income increasing*)**

Pola penaikkan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan untuk mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

- **Penurunan laba (*income decreasing*)**

Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

- **Perataan laba (*income smoothing*)**

Pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya”.

2.1.3.5 Teknik Manajemen Laba

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparini Harapan (2010:88) teknik atau tindakan manajemen laba meliputi:

1. “Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus).
2. Mengubah umur harta – untuk menghitung depresiasi
3. Mengubah nilai sisa harta – untuk menghitung depresiasi
4. Menetapkan cadangan/ penyisihan piutang tak tertagih
5. Menetapkan cadangan/ penyisihan kewajiban warranty (jaminan)
6. Menentukan penilaian atas cadangan pajak tangguhan
7. Menentukan adanya kerusakan harta atau kerugian
8. Mengestimasi tahapan penyelesaian dari kontrak (dengan) metode persentase-penyelesaian
9. Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak
10. Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu
11. Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan
12. Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus
13. Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension
15. Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam- proses
16. Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta tak berwujud
17. Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti: pengembangan urukan tanah (*landfill*), advertensi tanggap langsung, dan pengembangan piranti lunak
18. Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suatu derivative keuangan
19. Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan *investee* (anak perusahaan)
20. Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
2. Mencatat pendapatan palsu.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban”.

Kutipan diatas dapat dijelaskan empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba sebagai berikut:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.

Upaya ini dilakuakn manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya.

2. Mencatat pendapatan palsu

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui oendapatan palsu

sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapan pun.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Semakin kecil biaya ini membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan akan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban.

Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya.

Menurut John J Wild dan Subramanyam yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2010:131) terdapat tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Laba.
2. *Big Bath*.
3. Perataan Laba”.

Kutipan diatas dapat dijelaskan tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Laba

Salah satu teknik manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

2. *Big Bath*

Teknik *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Teknik *big bath* juga seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan laba dan kemudian melaporkan laba ini pada saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba seperti ini.

2.1.3.6 Metode Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Model Healy, Model De Angelo, Model Jones serta Model Jones dengan Modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode $t-1$

$T = 1, 2, \dots, T$ merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

T = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t .

TA_{t-1} = Total aktiva periode $t-1$.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus diatas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap

$\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 + b_1 \frac{1}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_3$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$NDA = \frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - b_1 \frac{1}{TA_{i,t-1}} - b_2 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - b_3$$

Keterangan:

b_0 = Estimated intercept perusahaan i periode t

b_1, b_2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Gross property, plant, and equipment perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA).

Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Modifikasi

Model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (D) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan (D) utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$\text{Current Accruals} = D(\text{Current Assets} - \text{Cash}) - D(\text{Current Liabilities Current Maturity of LongTerm})$$

Langkah III: menghitung nilai nondiscretionary *accruals* sesuai dengan rumus diatas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} = a_1 \frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} + a_2 \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} + e_{i,t}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu a_1 dan a_2 yang akan dimasukan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$\text{NDCA}_{i,t} = a_1 \frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} + a_2 \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$$

Keterangan:

$\text{NDCA}_{i,t}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan i periode t

a_1 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

a_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$\text{TA}_{i,t-1}$ = *Total assets* untuk perusahaan i periode t

$\Delta \text{Sales}_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t

$\Delta \text{TR}_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t

Langkah IV: menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *disrectionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\Delta TA_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - \frac{\Delta PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - \frac{\Delta Cash_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Langkah V: Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependennya serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 + b_1 \frac{1}{TA_{i,t-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} + b_3 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - b_1 \frac{1}{TA_{i,t-1}} - b_2 \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - b_3 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$$

Keterangan:

b_0 = Estimated intercept perusahaan i periode t

b_1, b_2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Gross property, plant, and equipment perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Langkah VI: Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals*, dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDTA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *disrectionary accruals* (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA).

Menurut Sri Sulistyanto (2008:212) pengukuran untuk mendeteksi manajemen laba adalah sebagai berikut:

”Model yang berbasis *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model Jones modifikasi menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment*, di mana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan sebagai proksi manajemen laba.”

Dalam hal ini, pengukuran manajemen laba dilihat dari besarnya *Non Discretionary Accruals* yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya.

2.1.3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (pengelola perusahaan). Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi mengenai perusahaan

yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Manajemen laba sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

Menurut Tri Widyastuti (2007) faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Struktur Kepemilikan
2. *Leverage*
3. Ukuran Perusahaan”.

Menurut Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Praktik *Good Corporate Governance*
2. *Leverage*
3. Ukuran Perusahaan”.

Menurut Halima Shatila Palestin (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Struktur Kepemilikan
2. Kompensasi Bonus”.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu: *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian yang memiliki hubungan dengan manajemen laba, diantaranya ialah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	RR. Sri Handayani dan Agustono Dwi Rachadi (2009)	“Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba”.	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh praktik manajemen laba untuk melaporkan <i>positif earnings</i> .
2.	Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010)	“Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governace</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap Manajemen Laba”.	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variable independen: <i>Mekanisme Good Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya	<i>Leverage</i> , Kualias Audit, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Komite Audit, Komisaris Independen, Independensi, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3.	Tri Widyastuti (2007)	“Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya pada <i>Return Saham</i> ”.	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Intervening: Dampaknya pada Return Saham Variabel Independen: Karakteristik Perusahaan	Variabel <i>leverage</i> , <i>size</i> , dan ROA berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Variabel Struktur Kepemilikan Manajerial dan Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap imbal hasil saham baik secara parsial maupun simultan.
4	Halima Shatila Palestin (2008)	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Praktik <i>Corporate Governance</i> , dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada di PT. Bursa Efek Indonesia)	Variabel dependen: Manajemen Laba Variabel independen: Struktur Kepemilikan, praktik <i>corporate governance</i> , dan Kompensasi Bonus	Struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi bonus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit dan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
5	Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar dan Dr. Siddharta Utama, CFA (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>corporate governance</i> terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>)”.	Variabel dependen: Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>) Variabel independen: Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>corporate governance</i>	Ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba. Variabel kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek corporate governance tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.
6	Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007)	“Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”.	Variabel dependen: Manajemen Laba Variabel independen: <i>Corporate Governance</i>	Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan.

7	Robert Jao dan Gagaring Pagalung (2011)	<i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia	Variabel dependen: Manajemen Laba Variabel independen: <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>leverage</i>	<i>Corporate Governance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
---	---	--	--	---

Sumber: dari berbagai jurnal

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba

Corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan *intern* dan *ekstern* perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba menurut Sri Sulistyanto (2008:154) adalah sebagai berikut:

“Salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengeliminir manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang

memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya.”

Menurut Sri Sulistyanto (2008:155) salah satu kunci utama untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Alasannya, terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sebuah perusahaan akan mendorong terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi dan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan publik.

Menurut Shen and Chih (2007) dalam Uwalomwa Uwuigbe, Daramola Sunday Peter and Anjolaoluwa Oyeniyi (2014) mengamati bahwa mekanisme corporate governance yang efektif akan cenderung kurang melakukan praktik manajemen laba.

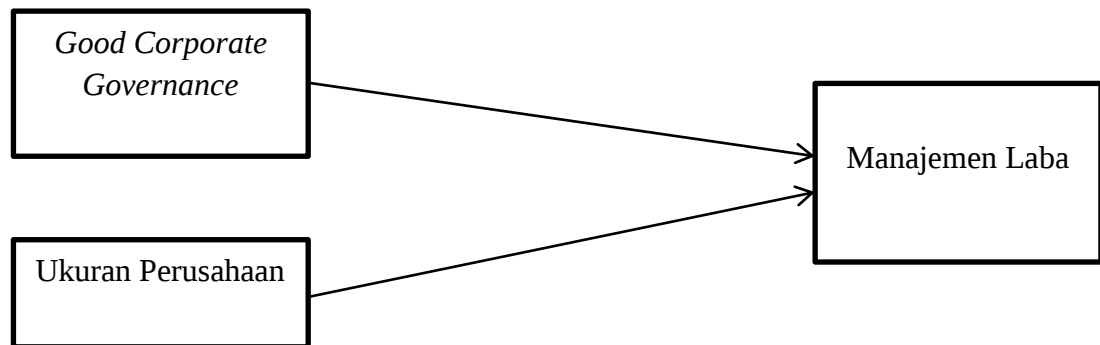
Menurut Sri Sulistyanto (2008:156) dengan dibangunnya sistem pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance*, yaitu menurunnya manajemen laba dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Apalagi secara empiris memang terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasannya, prinsip *good corporate governance* yang diterapkan secara konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) dan mengurangi penyimpangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan ini.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, kreditor, pemerintah maupun masyarakat. Ukuran perusahaan diduga mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunistik maka semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba (berhubungan negatif) tetapi jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya (berhubungan positif) (Albrecht & Richardson (1990) dan Lee & Choi (2002) dalam Sylvia dan Siddharta 2005).

Selain itu, menurut Watt and Zimmerman (1978) ukuran perusahaan sebagai proksi dari *political cost*, dianggap sangat sensitif terhadap perilaku pelaporan laba. Perusahaan berukuran sedang dan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para stakeholdernya, agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini mendorong manajemen untuk dapat memenuhi harapan tersebut (Barton and Simko (2002) dalam Sri dan Agustono (2009).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat bagan kerangka pemikiran, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2014:64) yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

- H_1 *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H_2 Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.